

## **IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh : Gita Agustiningrum**

*gitaagust@gmail.com*

**Pembimbing : Hasim As'ari**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### ***Abstract***

*The program of Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) is a district government program that has the aim of providing legal guarantees and certainty to the right and obligations of everyone to be involved and involve themselves in the process of managing development in the village. This study aims to find how the implementation of Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Program in Indragiri Hilir District and the factors that inhibited it. The theory used is theory of implementation program by Charles O. Jones, there are three indicators that affect implementation: organization, interpretation, and application (expectation). This study uses a type of qualitative research with a phenomenological approach and the data needed both primary and secondary were obtained through interviewing, observation and documentation techniques for further analysis of data using descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that, first implementation of Desa Maju Inhl Jaya (DMIJ) Program in Indragiri Hilir district has not been optimal from organizational structure, program implementers, coordination schedule of activities and performance. Second, the factors that hinder the implementation of Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Program in Indragiri Hilir district are human resource, coordination, communication, and control ranges.*

***Keywords: Desa Maju Inhil Jaya, Public Policy, Implementation, Program***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa di Indonesia akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan yang berpolitik yang lebih demokratis. Namun pada kenyataannya, proyek pembangunan pedesaan sudah menuai banyak kritik, baik dari segi perencanaan, proses, dan hasilnya. Hal itu terjadi karena program yang digalakkan untuk desa tersebut dirasa tidak maksimal.

Pengaruh yang ditimbulkan kepada desa tampak secara signifikan. Rendahnya kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan perlu ditindaklanjuti dengan suatu program pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan yang mengatur terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia diatur dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkait kebijakan yang mengatur tentang Desa sebagaimana disebutkan di muka, selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang telah diluncurkan sejak Tahun 2014 sebagai perwujudan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) merupakan program unggulan yang telah mengalami penyempurnaan dari program sebelumnya, yang saat ini

sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indragiri Hilir. Program ini disusun berdasarkan tipologi desa, pendataan keadaan desa, serta skala prioritas untuk melakukan pembangunan di desa karena setiap desa kebutuhan pembangunannya tidak sama.

Sebagai dasar untuk menjalankan program ini maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengesahkan: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan fisik seperti kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat desa, masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar desa. Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kemuning, Desa Keritang adalah salah satu desa yang melaksanakan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Penelitian ini difokuskan pada Desa Keritang karena berbagai permasalahan berada di Desa Keritang, dan juga tingkat permasalahannya lebih tinggi dari pada desa lain yang berada di Kecamatan Kemuning.

Pada penelitian ini, potensi yang akan dilihat adalah bagaimana Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) khususnya di tahun 2017. Pemilihan tahun 2017 karena pada tahun tersebut masih banyaknya terdapat masalah-masalah yang muncul dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Serta mengapa meneliti per tahun dikarenakan pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini telah

ada pagu anggaran dana desa pertahunnya.

Penulis memilih untuk membandingkannya dengan Desa Belaras Kecamatan Mandah dan Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu, karena Desa Belaras berlokasi di wilayah perairan, dan Desa Pulau Palas adalah desa yang terletak dekat dengan Ibu Kota Kabupaten, yaitu Tembilahan. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dengan letak geografis desa yang berjauhan dengan Ibu Kota Kabupaten, bisa dilihat pelaksanaan pencapaian dari Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini sama dengan desa-desa yang berada dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Hilir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan Ilmu Administrasi Publik khususnya pada bidang Kebijakan Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Kebijakan Publik

Menurut **Indiahono (2009:31)** berpendapat bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah berada dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. **Eulau dan Prewitt dalam (Thoha, 2003:61)**, mengatakan kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

**Kilpatrick** dalam **(Asra, 2014:11)** mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah aturan hukum, pilihan tindakan, dan prioritas alokasi dana yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada atau timbul dalam suatu masyarakat. Menurut **W.I. Jenkins** dalam **(Wahab, 2016:15)**, merumuskan kebijakan publik

sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut **Abidin (2016:19)** kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Menurut **Tjokroamidjojo** dalam (**Edi Suharto, 2008:116**), ada beberapa faktor yang turut memperbaiki kualitas suatu kebijakan, yaitu:

1. Jangan disarankan pada selera seketika (*whims*) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat.
2. Penyempurnaan informasi dan sistem informasi bagi analisa dan pembentukan kebijakan.
3. Dikembangkan *unified approach* dalam perumusan kebijakan.
4. Peka terhadap kebutuhan objektif masyarakat.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

**Pressman** dan **Wildavsky** dalam (**Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:20**) sebagai pelapor studi implementasi memberikan definisi bahwa implementasi dapat dimaknai dengan beberapa kata kunci berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut.

Menurut **Lester** dan **Stewart** dalam (**Winarno, 2014:147**) menjelaskan implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam (**Winarno, 2014:148**) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimasukkan untuk membuat program berjalan.

**Charles O. Jones** dalam (**Tahir, 2015:81**) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Menurut **Kusumanegara (2010:97)** mendefinisikan secara lebih luas implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dari hukum yang

didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi juga dapat ditafsirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang di implementasikan belum tentu dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak. Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya.

### 2.3 Program

Menurut **Nakamura dan Smallwood** dalam (**Sujianto, 2008:152**) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

1. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
2. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsunya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik

kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi proses.

3. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Menurut **Solihin (2009:71)** mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Menurut **Umar (2005:15)**, program atau program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

Menurut **Karding (2008:9)**, program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila ini dikaitkan dengan evaluasi program maka program di definisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat unsur penting yaitu:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

fenomenologi. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

### 3.1 Lokasi Penelitian

Karena keterbatasan peneliti, lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Keritang Kecamatan Kemuning, Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu, dan Desa Belaras Kecamatan Mandah. serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### 3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Dimana peneliti menentukan yang menjadi informan yaitu orang yang mewakili karakteristik populasi untuk memperoleh data untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Ada pun informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Masyarakat Desa Keritang Kecamatan Kemuning
3. Masyarakat Desa Belaras Kecamatan Mandah
4. Masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu

### 3.3 Jenis Data

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan berkaitan dengan Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir. Data penelitian diperoleh melalui wawancara secara langsung guna mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan. Data yang peneliti peroleh tersebut telah

peneliti sajikan pada hasil dan pembahasan sebagai penunjang untuk penelitian ini. Adapun data primer ini peneliti peroleh dari informan yang peneliti wawancarai.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu (jurnal). Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, dan Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Tahun 2017.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan di teliti.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang berguna untuk mencari data sekunder dan primer. Dokumentasi yang peneliti sajikan ada pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

*Pertama*, Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

*Kedua*, Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

*Ketiga*, Setelah itu, peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu

proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

*Keempat*, Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

*Kelima*, Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir

#### 4.1.1 Organisasi

Untuk melihat Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir, ada 3 (unsur) dalam organisasi yaitu: Struktur implementasi, implementor program, dan sarana prasarana organisasi. Struktur implementasi merupakan suatu sistem yang terencana untuk menjalankan kewajiban ataupun tugas yang dilaksanakan. Fakta yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara tidak sesuai dengan struktur implementor dari dari program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada Buku

Petunjuk Teknis (PTO) Program Desa Maju Inhil Jaya. Dikarenakan masih belum efektif nya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing implementor. Implementor program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Dari hasil kinerja masing-masing pihak didapatkan bahwa kinerja dari implementor program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di tingkat Kabupaten maupun tingkat Desa belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga ahli dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan tenaga ahli membuat berkurangnya performa yang dapat dilakukan oleh unsur pelaksana sehingga pelaksana tersebut tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tingkat capaian kinerja yang tidak baik mencerminkan tidak adanya upaya sungguh-sungguh dari keterlibatan perangkat daerah dalam melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) yang didukung oleh partisipasi masyarakat yang ada di desa. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Dari segi yang dibutuhkan, ketersediaan serta kualitas dan kuantitas masing-masing sarana prasarana pada program ini sudah mencukupi. Hal ini bisa di nyatakan implementasi mengenai organisasi dalam unsur sarana prasarana sudah berjalan

#### **4.1.2 Interpretasi**

Interpretasi yang dimaksud disini yaitu menafsirkan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini menjadi rencana dan pengarahan yang tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Agar

rencana dan pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Serta dilihat pula apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Interpretasi pada penelitian ini mengenai pandangan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), tujuan dan dampak, peran, dan tanggung jawab sudah sepenuhnya berhasil pada tingkat Kabupaten dan tingkat Desa. Namun mengenai koordinasi bisa terbilang kurang antara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan beberapa desa yang ada.

#### **4.1.3 Aplikasi (Penerapan)**

Aplikasi adalah suatu dimana peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Selain itu, sebelum melaksanakan suatu program juga diperlukan perencanaan program. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan, serta lebih mudah untuk menjalankan program tersebut.

Dalam kajian penelitian ini, dilihat dari unsur jadwal kegiatan dan kinerja masih menunjukkan hal yang minim. Jadwal kegiatan pembangunan infrastruktur belum optimal. Hal ini dikarenakan ada jenis kegiatan yang belum dapat terealisasi dan mengenai kinerja tentang hal-hal yang di rasa bisa untuk meminimalisir kurangnya kinerja dari kelompok

pekerja itu sendiri sudah dilakukan. Namun ada beberapa dari individu masing-masing yang terbilang belum ahli dalam bidangnya.

## **5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir**

### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan suatu program. Dalam program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini, terutama di desa-desa yang menjadi sasaran program sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam bidang masing-masing. Terkait dengan hal kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) masih dikatakan minim dikarenakan kurangnya tenaga ahli di desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dilapangan.

### **5.2.2 Koordinasi**

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa disinyalir menjadi salah satu faktor dominan kurang optimalnya implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir. kurangnya koordinasi dapat menjadikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan kedepannya. Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antara instansi yang ada di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa mengenai program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Kegunaan koordinasi adalah untuk mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi kebutuhan

dengan cara yang efisien.

### **5.2.3 Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi program. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada implementor yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditafsirkan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu program.

Buruknya komunikasi antara pelaksana kegiatan akan menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman muncul apabila masing-masing individu memiliki pemahaman dan persepsi yang berbeda dan tidak mampu menyamakan persepsi masing-masing. Hal tersebut bisa saja karena yang saling berkomunikasi memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda dan bisa pula karena penyampaian atau bentuk pesan kurang tepat sehingga memunculkan persepsi yang berbeda.

### **5.2.3 Rentang Kendali**

Rentang kendali merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab program untuk melakukan koordinasi secara efektif kepada tim nya. Pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini sangat diperlukannya rentang kendali, karena akan berhubungan dengan suatu pembagian kerja. Rentang kendali di program ini karena adanya keterbatasan

jarak. Letak geografis dari masing-masing desa menuju Kabupaten posisinya berbeda. Ada yang dekat dari ibukota kabupaten yaitu Tembilahan, dan ada pula yang jauh. Hal ini menjadikan salah satu faktor penghambat keberhasilan implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir.

## **6. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan, maka penelitian terkait Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) masih belum optimal. Dilihat dari indikator organisasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek struktur organisasi belum berjalannya seluruh tugas pokok dan fungsi dari masing-masing implementor kegiatan yang ada di desa. Dilihat dari segi implementor program juga belum sepenuhnya maksimal, karena keterbatasan tenaga ahli di desa. Kemudian dilihat dari indikator interpretasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek koordinasi, pihak desa menyebutkan bahwa koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa tidak berjalan dengan lancar. Dan dilihat dari indikator aplikasi, belum berjalan secara optimal karena dari segi aspek jadwal kegiatan dan kinerja masih menunjukkan hal yang minim.
2. Dalam kegiatan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), faktor yang menghambat implementasi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir adalah

karena adanya faktor sumber daya manusia, koordinasi, komunikasi dan rentang kendali.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Agar kegiatan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) berjalan maksimal, diharapkan mampu memberikan pelatihan yang lebih untuk meningkatkan kemampuan tenaga ahli yang ada di desa dan keahlian dibidang lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) agar sumber daya yang dibutuhkan memadai.
2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu meningkatkan koordinasi yang ada agar keberhasilan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini dinyatakan berhasil 100%. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini merupakan program yang berkelanjutan di setiap tahunnya, maka perlu nya koordinasi yang bagus antara pihak-pihak yang terkait melalui program ini.
3. Implementor kegiatan harus meningkatkan lagi komunikasi. Agar keselarasan informasi dari pihak-pihak yang terkait tidak merugikan satu sama lain terhadap kesuksesan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) ini.
4. Agar lebih bisa mengoptimalkan kegiatan seperti pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari jauh hari telah diberitahu agar ada persiapan dalam mengikuti kegiatan bagi desa-desa yang berada jauh dari Tembilahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Pusaka.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karding. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang*. Semarang.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Apikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, Ahmad. 1998. *Kisi-kisi Kebijakan*. Rineka Cipta: Bandung.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafii, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) & Lemlit UNPAD.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hasesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publi yang Membumi*. Yogyakarta: (YPAPI) Lukman Offset.
- Thoha, Miftah. 2003. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS.

**Jurnal:**

Bernardus Seran Kehik, Salesius Vitalis Kolne, Fidelis Atanus. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri Cinta Petani Di Kabupaten Timor Tengah Utara*.

Agustinus Longa Tiza, Abdul Hakim, Bambang Santoso Haryono. 2014. *Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara*.

Adib Afdholi, Aufarul Marom, Fathurrohan, 2014. *Implementasi Program Desa Vokasi di Kota Semarang*.

Nuring Septyasa Laksana, 2014. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Iin Nimang Pangesti, 2014. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang*.

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya.

Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Desa Maju Inhil Jaya (2017).

**Website:**

<https://inhilkab.bps.go.id/statictable/2016/01/13/68/nama-kecamatan-dan-ibukota-kecamatan-di-kabupaten-indragiri-hilir-2014.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 20.00 wib.

**Dokumen:**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun